

THE INFLUENCE OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX, LABOR FORCE AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY IN MIMIKA DISTRICT

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MIMIKA

Sabina Gimun¹, Merry², Magdalena Mosso³, Ignasius Narew^{4*}

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

⁴Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

sabinagimun40@gmail.com¹, merryapril26@gmail.com², memosmega68704@gmail.com³, ignasiusnarew@gmail.com^{4*}

Abstract

This research aims to analyze the influence of the human development index, labor force and unemployment on poverty using the associative method. The data in this research comes from BPS Mimika Regency with samples from 2012-2021 and was analyzed using multiple linear regression to find the influence of the independent variables (HDI, labor force and unemployment) on the dependent variable (poverty). The results of the analysis show that HDI has a negative and significant effect on poverty, while labor force and unemployment do not have a significant effect on poverty in Mimika Regency.

Keywords: Human Development Index, Labor Force, Unemployment, Poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, angkatan kerja dan pengangguran terhadap kemiskinan dengan menggunakan metode asosiatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Mimika dengan sampel tahun 2012-2021 dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menemukan pengaruh antara variable bebas (IPM, angkatan kerja dan pengangguran) terhadap variable terikat (kemiskinan). Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan angkatan kerja dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika.

KataKunci: Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Pengangguran, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Mardiatillah et al. (2021), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga, baik dalam hal uang, pengetahuan, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha, dan bekerja. Ini mencakup ketidakmampuan, kebebasan, aset, dan aksesibilitas untuk kebutuhan masa depan, serta kerentanan terhadap risiko dan tekanan, seperti penyakit dan peningkatan harga bahan pokok serta pendidikan. Utami (2020) menambahkan bahwa kemiskinan adalah masalah dalam

pembangunan yang tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan bermartabat.

Selain itu, kemiskinan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Masyarakat miskin cenderung memiliki daya beli rendah yang berdampak pada efek multiplier ekonomi, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rahayu (2018) menyatakan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan yang rendah,

kesehatan yang buruk, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan keterbatasan akses terhadap modal.

Persepsi mengenai kemiskinan bervariasi antara budaya yang satu dengan lainnya, mencerminkan prioritas nasional dan konsep kesejahteraan yang normatif. Sukmaraga(2018) mengemukakan bahwa garis kemiskinan, yang mencakup pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar, berbeda-beda di setiap negara, dipengaruhi oleh perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Garis kemiskinan merupakan batasan yang menyatakan seseorang dianggap miskin jika dilihat dari sudut konsumsi. Masalah kemiskinan di dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tantangan yang dihadapi oleh angkatan kerja dalam mencari pekerjaan yang layak, serta tingginya angka pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Yustie (2017), menjelaskan bahwa IPM mencakup tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi fisik masyarakat seperti kesehatan dan daya beli, tetapi juga aspek non-fisik seperti kualitas pendidikan. Susanti(2013) menambahkan bahwa, IPM berfungsi memberikan tuntunan dalam perencanaan pembangunan, membantu menentukan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran yang sesuai.

Angkatan kerja merupakan bagian penting dari perekonomian. Eliza (2015) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan. Kurniawan & Budhi (Himo et al., 2022) menambahkan bahwa angkatan kerja mencakup orang yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi tidak bekerja sementara, dan pengangguran. Angkatan kerja yang aktif berkontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan pendapatan yang stabil dan layak.

Pengangguran, di sisi lain, memiliki dampak buruk terhadap kemiskinan. (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018) menyatakan bahwa pengangguran terdiri dari tiga jenis: friksional, struktural, dan siklis. Pengangguran friksional terjadi karena pencari kerja menginginkan pekerjaan yang lebih baik, struktural karena ketidakcocokan kualifikasi,

dan siklis karena perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, menghambat kemakmuran, dan dapat menyebabkan kekacauan politik dan sosial.

Kabupaten Mimika, berdasarkan data tingkat kemiskinan yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 20,09% hingga tahun 2021 sebesar 14,17% menunjukkan pola penurunan yang berkelanjutan dalam kondisi kemiskinan. Meskipun terdapat fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2021, tren keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan dalam hal penurunan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Penurunan ini dapat tercermin dari upaya pemerintah daerah dan berbagai program sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih stabil dan signifikan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendasari fluktuasi tersebut, termasuk peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angkatan kerja, dan tingkat pengangguran dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

Menurut Aulia (2023), peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Yustie (2017), Priseptian & Primandhana (2022), dan Aulia (2023) mendukung temuan ini.

Angkatan kerja yang kuat dan produktif juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Aulia (2023) menyatakan bahwa peningkatan lapangan kerja dan akses terhadap pekerjaan layak membantu mengurangi jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, masalah seperti pengangguran struktural dan ketidakstabilan ekonomi dalam angkatan kerja dapat meningkatkan kemiskinan. Desmawan et al., (2023), Isnaini & Nugroho (2020), dan (Tobing et al., 2023) mengkonfirmasi bahwa angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Pengangguran, seperti yang diungkapkan oleh Sukirno (Mardiatillah et al., 2021), memiliki pengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Penelitian

oleh Yustie (2017), Mardiatillah et al., (2021), dan Priseptian & Primandhana (2022), menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, angkatan kerja, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini akan memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu metode asosiatif untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas ke variabel terikat. Data yang digunakan berupa data kuantitatif yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi dari sumber sekunder yakni BPS Kabupaten Mimika. Pengaruh IPM, Angkatan Kerja dan Pengangguran terhadap Kemiskinan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan sampel dari populasi objek penelitian yakni pengaruh IPM, angkatan kerja, dan pengangguran terhadap kemiskinan yang dikaji hanya pada tahun 2012-2021

HASIL PENELITIAN

Gambaran IPM, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2012-2021 dapat ditunjukkan pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten Mimika (2012-2021)

Tahun	IPM (%)	Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Pengangguran (%)	Kemiskinan (%)
2012	68,95	64,3	7,15	20,09
2013	69,50	61,15	6,76	20,37
2014	70,40	59,6	4,70	16,11
2015	70,89	65,75	7,94	16,20
2016	71,64	76,7	7,24	14,72
2017	72,42	65,83	7,70	14,89
2018	73,15	68,88	8,30	14,55
2019	74,13	64,93	7,51	14,54
2020	74,19	63,46	7,80	14,26
2021	74,48	64,77	5,37	14,17

Sumber: BPS Kabupaten Mimika 2024

Data pada tabel 1 menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan hingga peningkatan tertinggi di tahun 2021. Partisipasi angkatan kerja tertinggi terjadi di tahun 2016 dan terendah di tahun 2014 sedangkan pengangguran di Kabupaten Mimika masih menyentuh angka lima persen. Selanjutnya, gambaran mengenai kemiskinan di Kabupaten Mimika selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang konsisten yang berarti

bahwa adanya upaya dari pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian kelayakan dari model konstruk penelitian yang dibangun digunakan uji f dengan melihat besarnya nilai probabilitas hasil uji. Model penelitian dikatakan layak apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berikut hasil pengujian kelayakan model penelitian:

Tabel 2. Pengujian Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40,892	3	13,631	9,661	,010 ^b
	Residual	8,465	6	1,411		
	Total	49,357	9			

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengangguran (x3), IPM(x1), Partisipasi Angkatan Kerja (x2)

Sumber: Data Diolah SPSS 2024

Hasil penguji di atas diperoleh nilai probabilitas dari model penelitian yang dibangun sebesar 0,01 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa model pada penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Pengaruh Variabel Bebas

Tabel 3. Hasil Uji Coefficients^a Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	93,705	14,500	
IPM(x1)	-,975	,201	-,838
Partisipasi Angkatan Kerja (x2)	-,148	,095	-,296
Pengangguran (x3)	,310	,382	,153

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Y)

Sumber: Data Diolah SPSS 2024

Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada tabel 3, maka dihasilkan persamaan regresi berikut:

$$\text{Kemiskinan} = a \ 93,705 - 0,975 \text{ IPM} - 0,148 \text{ Partisipasi Angkatan Kerja} + 0,310 \text{ Pengangguran}$$

Nilai konstan positif sebesar 93,705 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel lainnya di luar penelitian selain IPM, Partisipasi angkatan kerja, dan Pengangguran sebesar 93,705 poin. Koefisien regresi X_1 sebesar -0,975 menunjukkan jika IPM (X_1) mengalami kenaikan satu satuan, maka kemiskinan (Y) akan menurun sebesar -0,975 point. Koefisien regresi X_2 sebesar -

Uji Signifikansi Pengaruh

Uji signifikansi pengaruh menggunakan uji t statistik dengan melihat taraf signifikansi

Terhadap Variabel Terikat

Pengujian Pengaruh antar variabel digunakan nilai Coefficient dari hasil regresi untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan hasil analisis sebagai berikut:

0,148 berarti bahwa jika Partisipasi angkatan kerja (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka kemiskinan (Y) akan menurun sebesar -0,148 satuan.

Koefisien regresi X_3 sebesar 0,310 menunjukkan bahwa jika Pengangguran (X_3) mengalami peningkatan satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan Kemiskinan (Y) sebesar 0,310 poin.

pengaruh dari setiap variabel bebas yang meliputi IPM, Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika ke variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

Model	t	Sig.
(Constant)	6,462	,001
IPM(x1)	-4,850	,003
Partisipasi Angkatan Kerja (x2)	-1,559	,170
Pengangguran (x3)	,812	,448

Sumber: Data Diolah SPSS 2024

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat pada tabel 4, diketahui Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar $0,003 <$ dari nilai signifikansi $0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Angkatan Kerja memiliki nilai probabilitas sebesar $0,170 >$ dari $0,05$ maka disimpulkan bahwa variabel Angkatan Kerja berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika. Variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas

sebesar $0,448 >$ dari $0,05$ maka disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Uji Besarnya Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Pengujian besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dilakukan dengan menggunakan uji R^2 sebagaimana pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Uji Kekuatan Pengaruh

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,910 ^a	,828	,743	1,18778

Sumber: Data Diolah SPSS 2024

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar $0,910$ dan di jelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,828$ yang mengandung pengertian bahwa

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup

pengaruh variabel bebas (IPM, Partisipasi Angkatan kerja, dan Pengangguran) terhadap variabel terikat (Kemiskinan) adalah sebesar $82,8 \%$, sedangkan sisanya sebesar $17,2 \%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

layak (diukur melalui pendapatan per kapita). Penelitian yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika mengindikasikan bahwa peningkatan IPM secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pengaruh negatif ini berarti bahwa ketika nilai IPM meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan dalam dimensi kesehatan, seperti akses yang

lebih baik terhadap layanan kesehatan dan peningkatan harapan hidup, dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat akibat penyakit atau kondisi kesehatan yang buruk. Kedua, peningkatan dalam sektor pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang lebih tinggi menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.

Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam standar hidup masyarakat, yang berarti lebih banyak individu dan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, perumahan, dan pakaian. Dengan demikian, peningkatan dalam standar hidup ini secara langsung mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di Kabupaten Mimika, peningkatan IPM dapat dihasilkan dari berbagai inisiatif pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, investasi dalam fasilitas pendidikan dan pelatihan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja lokal, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, program kesehatan yang efektif dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas kerja.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara IPM dan kemiskinan di Kabupaten Mimika memberikan bukti empiris bagi pembuat kebijakan untuk terus fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Dengan terus meningkatkan IPM, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika dapat terus menurun, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Menurut Penelitian Mersiana (Aulia, 2023:16) menyatakan bahwa Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) merupakan pencapaian pembangunan manusia yang diukur melalui tiga komponen keberhasilan yaitu, mendapatkan kehidupan yang sehat (longevity), memiliki standar kehidupan yang layak (living standards), dan memperoleh atau menguasai pengetahuan (knowledge). Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dapat diukur melalui angka harapan hidup, untuk standar kehidupan yang layak biasanya diukur dengan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dalam mendapatkan pengetahuan, normalnya diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulia (2023:93) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2010 – 2020.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Hasil analisis yang menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika memberikan wawasan yang kompleks tentang dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Pengaruh negatif ini berarti bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja cenderung berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh ini menunjukkan bahwa perubahan dalam jumlah angkatan kerja tidak memiliki dampak yang cukup kuat atau konsisten untuk secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan di Mimika.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hasil ini. Pertama, meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, hal ini mungkin tidak diiringi dengan peningkatan lapangan

kerja yang memadai. Dengan kata lain, meskipun lebih banyak orang yang siap dan mampu bekerja, tidak semuanya dapat menemukan pekerjaan yang layak. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, atau hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja.

Kedua, kualitas pekerjaan yang tersedia mungkin tidak cukup untuk mengangkat penduduk keluar dari kemiskinan. Banyak pekerjaan yang mungkin bersifat informal, berupah rendah, atau tidak menawarkan keamanan kerja dan manfaat sosial yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan meskipun lebih banyak orang bekerja, pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidupnya.

Ketiga, angkatan kerja yang meningkat tanpa didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai membatasi kemampuan tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan berupah tinggi, sehingga menghambat kemampuannya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk mengatasi ketidaksignifikanan pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika untuk fokus pada beberapa strategi. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kedua, penciptaan lapangan kerja melalui investasi dalam sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, dan jasa, yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, yang tidak hanya menciptakan pekerjaan tetapi juga

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun angkatan kerja memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan, hasil yang tidak signifikan menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mimika. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut penelitian Mala (Ibiyantoro & Imaningsih, 2022:99) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing et al., (2023) dan Aulia (2023) yang turut membuktikan Variabel Angkatan Kerja memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika memberikan gambaran penting tentang kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pengaruh positif ini berarti bahwa peningkatan tingkat pengangguran cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh ini menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tidak memiliki

dampak yang cukup kuat atau konsisten untuk secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan di Mimika.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hasil ini. Pertama, meskipun ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, dampak dari pengangguran terhadap kemiskinan mungkin tertutupi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, atau jaringan sosial yang kuat. Misalnya, keluarga yang memiliki anggota yang menganggur tetapi memiliki akses ke sumber daya lain atau dukungan komunitas mungkin tidak mengalami peningkatan kemiskinan yang signifikan.

Kedua, adanya program sosial dan bantuan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat membantu mengurangi dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Bantuan langsung, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi dapat memberikan jaringan pengaman bagi individu yang menganggur sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ketiga, sektor informal yang kuat di Kabupaten Mimika turut serta berperan dalam mengurangi dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Individu yang tidak memiliki pekerjaan formal tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan melalui pekerjaan informal, perdagangan kecil-kecilan, atau kegiatan ekonomi lainnya. Ini berarti bahwa meskipun secara teknis dianggap menganggur, namun masih dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan menghindari kemiskinan ekstrem.

Untuk mengatasi ketidaksignifikanan pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, meningkatkan kualitas dan akses ke pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kedua, mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal

secara signifikan, sehingga menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan formal yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat program sosial dan jaringan pengaman untuk mendukung individu yang menganggur, termasuk bantuan finansial, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, kebijakan yang fokus pada pengurangan hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja juga penting. Ini mencakup peningkatan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah, penyederhanaan regulasi bisnis, dan promosi kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, meskipun pengangguran menunjukkan korelasi positif dengan kemiskinan, hasil yang tidak signifikan menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terfokus untuk mengatasi tantangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Mimika. Upaya terpadu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibiyantoro & Imaningsih (2022:167) variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Mimika. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita berkontribusi signifikan dalam mengurangi jumlah orang yang hidup di

bawah garis kemiskinan.

2. Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun peningkatan jumlah angkatan kerja cenderung berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Faktor-faktor seperti kurangnya lapangan kerja yang memadai dan kualitas pekerjaan yang tidak cukup baik dapat menghambat dampak positif dari peningkatan angkatan kerja terhadap pengurangan kemiskinan.
3. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan tingkat pengangguran cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan, tetapi pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Faktor-faktor seperti program sosial, bantuan pemerintah, dan sektor informal yang kuat dapat mengurangi dampak negatif dari pengangguran terhadap kemiskinan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mimika:

1. Peningkatan IPM: Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan IPM melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan per kapita harus diprioritaskan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas lapangan kerja perlu ditingkatkan. Ini bisa dilakukan melalui investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, seperti industri, pertanian, dan jasa. Pemerintah juga harus mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan sangat penting untuk memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan

mengurangi tingkat pengangguran.

4. Program Sosial dan Jaringan Pengaman: Penguatan program sosial dan jaringan pengaman, termasuk bantuan finansial, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi, dapat membantu individu yang menganggur memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan.
5. Pengurangan Hambatan Struktural: Kebijakan yang fokus pada pengurangan hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja, seperti peningkatan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah, penyederhanaan regulasi bisnis, dan promosi kewirausahaan, perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika dapat terus menurun, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh 2010-2020*. (Vol. 9). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Desmawan, D., Salsabila, A. K., Amalia, L., Anargya, R. A., Kirana, R. S., & Valentina. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 1156–1164. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/4124/3114>
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pekbis*, 7(3), 200–210. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/2925/2858>
- Himo, J. T., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran

- Terbuka di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 124–135.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42238/37378>
- Ibiyantoro, A. S., & Imaningsih, N. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 98–102.
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1003/735>
- Isnaini, S. J., & Nugroho, R. Y. Y. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 176–187.
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i2.120>
- Mardiatillah, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2021). *Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019*. 10(2), 365–370.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, u. sulia. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–234.
<https://www.academia.edu/download/76624968/pdf.pdf>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 1(24), 45–53.
<https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>
- Rahayu, Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business*, 2(1), 116–174.
<http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/40/50>
- Sukmaraga, P. (2018). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi* (Vol. 2, Issue 1) [universitas diponegoro semarang].
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.40>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18.
<https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374>
- Tobing, R. K. L., Tambunan, N. B., Sinaga, D., Tarigan, I. S., & Amanda, S. (2023). Analisis Pengaruh Human Capital, Angkatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2006-2022. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 16–28.
<https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/view/377/338>
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v7i1.15244>
- Yustie, R. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium*, 49–57.
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/418/398>